LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2026

JUDUL

"Kajian Model Research-to-Policy dan Pemanfaatan Hasil Riset-Inovasi untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Prof. Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan salah satu prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kompleksitas permasalahan pembangunan yang semakin tinggi menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak lagi memadai apabila hanya didasarkan pada pengalaman administratif, asumsi, atau praktik yang telah berlangsung sebelumnya. Pemerintah daerah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang mampu memanfaatkan data, hasil penelitian, evaluasi program, pengetahuan profesional, serta informasi kontekstual secara sistematis untuk memahami masalah, membandingkan alternatif kebijakan, memperkirakan risiko, dan mengevaluasi manfaat intervensi yang telah dilakukan.

Dalam konteks tersebut, riset memiliki fungsi strategis sebagai sumber bukti bagi proses kebijakan. Namun, tersedianya penelitian dan kajian tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam tata kelola riset pemerintah adalah adanya kesenjangan antara knowledge production dan knowledge utilization, yaitu kondisi ketika berbagai penelitian dan kajian telah diselesaikan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keputusan, program, perubahan tata kelola, atau perbaikan pelayanan publik.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian dalam pengembangan tata kelola riset dan inovasi Kabupaten Klungkung. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah mengidentifikasi bahwa masalah yang paling konsisten bukan semata-mata kekurangan gagasan inovasi, melainkan adanya jarak antara keluaran riset dengan

pemanfaatannya. Dokumen tersebut mencatat belum optimalnya pemanfaatan kajian dan hasil riset, kebutuhan penguatan tindak lanjut rekomendasi, keterbatasan diseminasi, serta perlunya memperkuat hubungan antara riset, pengguna hasil, dan keputusan kebijakan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan riset daerah perlu bergeser dari orientasi yang dominan pada penyelesaian dokumen menuju orientasi pada penggunaan bukti dan penciptaan manfaat. Sebuah kajian tidak semestinya dianggap selesai hanya ketika laporan akhir telah diserahkan. Kajian baru memberikan nilai publik apabila pengetahuan yang dihasilkan dipahami oleh pengguna, dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, ditindaklanjuti apabila layak, serta dievaluasi manfaat penerapannya.

Arah tersebut telah memperoleh dasar normatif dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Riset dan Inovasi Daerah. Ranperda menempatkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Pemanfaatan bukti juga diarahkan untuk mempertimbangkan mutu, relevansi, kemutakhiran, konteks daerah, risiko, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap perencanaan, Ranperda juga mengatur bahwa agenda prioritas riset dan inovasi harus memuat masalah atau kebutuhan kebijakan, keluaran, hasil yang diharapkan, calon pengguna hasil, rencana pemanfaatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara penelitian dengan pemanfaatannya seharusnya telah dirancang sejak kegiatan belum dilaksanakan.

Lebih lanjut, hasil riset yang dibiayai dari anggaran daerah diwajibkan untuk disampaikan kepada BRIDA dan Perangkat Daerah pengguna hasil. Hasil tersebut sekurang-kurangnya harus disertai ringkasan eksekutif, rekomendasi, data atau metadata yang dapat diserahkan, serta rencana pemanfaatan. Perangkat Daerah pengguna kemudian memberikan tanggapan mengenai rekomendasi yang dapat diterima, ditindaklanjuti dengan penyesuaian, atau belum dapat dilaksanakan beserta alasannya, sedangkan BRIDA memantau tindak lanjut dan pemanfaatannya.

Ranperda juga memberikan peran penting kepada BRIDA untuk memfasilitasi penerjemahan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan, prototipe, model layanan, pedoman, atau bentuk keluaran lain yang dapat digunakan. Perangkat Daerah selanjutnya mengintegrasikan hasil yang telah dinilai layak ke dalam kebijakan, program, kegiatan, atau pelayanan sesuai kewenangannya.

Ketentuan tersebut pada dasarnya telah membentuk fondasi bagi penerapan pendekatan Research-to-Policy. Namun demikian, agar dapat dilaksanakan secara konsisten, masih diperlukan suatu model operasional yang mengatur bagaimana hasil riset diterjemahkan menjadi evidence yang siap digunakan, bagaimana bukti tersebut masuk ke proses pembahasan kebijakan, bagaimana tanggapan pengguna didokumentasikan, bagaimana implementasi dipantau, serta bagaimana dampaknya dievaluasi.

Research-to-Policy dalam kajian ini tidak dimaknai sebagai mekanisme yang memaksa setiap hasil penelitian menjadi kebijakan. Riset merupakan salah satu sumber bukti dalam

proses pengambilan keputusan, sementara keputusan publik tetap dipengaruhi oleh kewenangan, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal, aspirasi masyarakat, risiko, nilai publik, dan pertimbangan politik-administratif. Oleh karena itu, fungsi utama Research-to-Policy adalah memastikan bahwa evidence yang relevan tersedia, dapat dipahami, dipertimbangkan secara sistematis, dan keputusan atas evidence tersebut dapat ditelusuri.

Atas dasar tersebut, dibutuhkan Model Research-to-Policy dan Pemanfaatan Hasil Riset-Inovasi Kabupaten Klungkung sebagai mekanisme penghubung antara sistem produksi pengetahuan dan sistem pengambilan keputusan. Model ini diarahkan untuk membentuk siklus:

Permasalahan Kebijakan → Kebutuhan Bukti → Riset → Sintesis Bukti → Policy Translation → Deliberasi Kebijakan → Keputusan → Implementasi → Evaluasi → Pembelajaran

Dengan model tersebut, hasil riset tidak berhenti sebagai produk akademik, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan berbasis bukti dan pembelajaran kelembagaan.

I. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Kajian Model Research-to-Policy dan Pemanfaatan Hasil Riset-Inovasi dimaksudkan untuk merumuskan kerangka konseptual dan operasional yang menghubungkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan inovasi dengan proses perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Model ini dirancang sebagai instrumen pelaksanaan Ranperda Riset dan Inovasi Daerah, khususnya dalam memastikan bahwa investasi pemerintah daerah pada kegiatan riset menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi terukur terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

Dalam kerangka yang lebih luas, kajian ini dimaksudkan untuk mendukung perubahan paradigma dari research output-oriented governance menuju evidence utilization and impact-oriented governance, yaitu tata kelola yang tidak hanya mengukur jumlah penelitian yang dihasilkan, tetapi juga menilai tingkat penggunaan, perubahan kebijakan, dan manfaat yang ditimbulkannya.

2.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan merumuskan model Research-to-Policy yang dapat digunakan sebagai mekanisme baku untuk menghubungkan kegiatan riset dengan proses kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Model tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa kebutuhan bukti telah teridentifikasi sejak tahap perencanaan, pengguna hasil dilibatkan sejak awal, serta bentuk keluaran penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan keputusan.

Kajian juga bertujuan mengembangkan mekanisme knowledge translation, sehingga hasil penelitian yang bersifat ilmiah dapat diterjemahkan menjadi produk pengetahuan yang lebih mudah digunakan oleh pengambil kebijakan tanpa menghilangkan integritas evidence yang mendasarinya. Selanjutnya, diperlukan mekanisme yang memastikan

rekomendasi mendapatkan tanggapan formal, mempunyai status tindak lanjut yang jelas, dan dapat dipantau hingga tahap implementasi.

Tujuan lainnya adalah membangun kerangka pengukuran pemanfaatan hasil riset yang membedakan antara output, utilization, outcome, dan impact. Melalui kerangka tersebut, efektivitas kegiatan riset tidak hanya dinilai berdasarkan penyelesaian laporan, tetapi berdasarkan kontribusinya terhadap perubahan keputusan, program, tata kelola, pelayanan, atau pembangunan daerah.

Pada akhirnya, model ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai evidence-informed and learning government, yaitu pemerintahan yang mampu menggunakan pengetahuan secara sistematis sekaligus belajar dari hasil implementasi kebijakannya.

II. Ide dan Gagasan

3.1 Konsep Model Research-to-Policy

Model Research-to-Policy Kabupaten Klungkung dirancang sebagai suatu mekanisme yang menghubungkan proses produksi pengetahuan dengan proses penggunaan pengetahuan dalam kebijakan. Konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kualitas kebijakan tidak hanya bergantung pada tersedianya penelitian, tetapi juga pada kemampuan sistem pemerintahan untuk menemukan, memahami, menilai, menerjemahkan, dan menggunakan evidence.

Research-to-Policy karena itu tidak dapat dipahami sebagai proses linier sederhana dari penelitian menuju kebijakan. Hubungan antara riset dan kebijakan bersifat interaktif. Pengguna kebijakan seharusnya terlibat sejak perumusan kebutuhan riset, sementara peneliti dan BRIDA perlu memahami konteks implementasi yang dihadapi Perangkat Daerah.

Model yang dikembangkan menggunakan siklus konseptual:

Policy Problem → Evidence Need → Research & Evidence Generation → Evidence Synthesis → Policy Translation → Policy Deliberation → Decision → Implementation → Outcome & Impact Evaluation → Learning

Siklus tersebut menempatkan permasalahan kebijakan sebagai titik awal dan pembelajaran sebagai akhir yang sekaligus menjadi awal siklus berikutnya. Dengan demikian, model bersifat closed-loop dan memungkinkan bukti baru muncul dari hasil implementasi kebijakan.

Peran BRIDA dalam model ini berada pada posisi penghubung. BRIDA tidak menggantikan kewenangan Perangkat Daerah dalam membuat keputusan, tetapi memastikan bahwa hubungan antara kebutuhan kebijakan dengan sumber pengetahuan dapat berjalan. Fungsi tersebut dapat dipahami sebagai knowledge brokerage, yaitu kemampuan untuk mempertemukan kebutuhan evidence, produsen pengetahuan, pengguna kebijakan, dan mekanisme tindak lanjut.

3.2 Identifikasi Policy Problem dan Evidence Need

Research-to-Policy yang efektif harus dimulai sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi policy problem, yaitu masalah yang memerlukan keputusan pemerintah dan belum memiliki evidence yang memadai.

Dalam praktiknya, tidak seluruh masalah memerlukan penelitian baru. Sebagian

kebutuhan dapat dijawab dengan data administrasi, statistik resmi, hasil kajian terdahulu, evaluasi program, atau pengetahuan profesional. Oleh sebab itu, proses awal harus mampu membedakan antara masalah yang membutuhkan new evidence generation dan masalah yang cukup dijawab melalui evidence synthesis.

Ranperda telah memberikan dasar untuk pendekatan tersebut melalui pengaturan agenda prioritas yang harus memuat masalah atau kebutuhan kebijakan, calon pengguna hasil, dan rencana pemanfaatan.

Secara operasional, proses tersebut perlu menghasilkan Evidence Need Statement yang sekurang-kurangnya menjelaskan permasalahan, keputusan yang akan dibuat, informasi yang belum tersedia, evidence yang dibutuhkan, pengguna hasil, waktu kebutuhan, serta konsekuensi apabila keputusan ditunda. Dengan mekanisme tersebut, orientasi kegiatan berubah dari pertanyaan "penelitian apa yang akan dilakukan?" menjadi "bukti apa yang diperlukan agar keputusan dapat dibuat secara lebih baik?"

3.3 Pelibatan Research User Sejak Tahap Awal

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Research-to-Policy adalah keterlibatan pengguna hasil sejak perencanaan. Pemanfaatan riset cenderung rendah apabila Perangkat Daerah baru menerima laporan setelah penelitian selesai tanpa sebelumnya terlibat dalam merumuskan pertanyaan dan keluaran.

Oleh karena itu, model mengusulkan penetapan Research User secara formal untuk setiap kegiatan yang dimaksudkan mendukung kebijakan daerah. Research User berperan dalam menjelaskan kebutuhan keputusan, menyediakan konteks kebijakan dan data sektoral, menilai relevansi keluaran, serta memberikan tanggapan terhadap rekomendasi. Posisi ini berbeda dengan pelaksana riset. Pengguna tidak harus menentukan metodologi, tetapi perlu memastikan pertanyaan penelitian relevan terhadap persoalan yang sedang dihadapi.

Ketentuan Ranperda mengenai kewajiban penyampaian hasil kepada Perangkat Daerah pengguna dan pemberian tanggapan atas rekomendasi menunjukkan bahwa posisi pengguna telah memperoleh dasar normatif. Dengan pelibatan sejak awal, proses penelitian menjadi bentuk co-production of policy knowledge, yaitu pengetahuan dikembangkan melalui interaksi antara kebutuhan praktis pemerintahan dan kompetensi ilmiah.

3.4 Produksi dan Penilaian Evidence

Evidence yang digunakan dalam kebijakan harus memenuhi standar mutu tertentu. Tidak semua hasil penelitian mempunyai kekuatan bukti yang sama, dan tidak seluruh evidence dapat diterapkan secara langsung pada konteks Kabupaten Klungkung.

Karena itu, model Research-to-Policy perlu memasukkan tahapan evidence appraisal. Penilaian sekurang-kurangnya mempertimbangkan validitas metode, kualitas data, relevansi terhadap pertanyaan kebijakan, kemutakhiran, kesesuaian dengan karakter wilayah, risiko penerapan, serta keterbatasan hasil penelitian.

Pendekatan ini konsisten dengan Ranperda yang mengarahkan penggunaan hasil riset dengan mempertimbangkan mutu bukti, relevansi, kemutakhiran, konteks daerah, dan risiko.

Evidence appraisal juga penting untuk mencegah dua kecenderungan, yaitu penggunaan hasil penelitian secara

berlebihan seolah-olah merupakan satu-satunya dasar keputusan, atau sebaliknya pengabaian penelitian tanpa pertimbangan yang terdokumentasi.

Dalam konteks kebijakan berbasis bukti, evidence harus ditempatkan sebagai input yang dipertimbangkan secara transparan, bukan sebagai pengganti kewenangan pengambil keputusan.

3.5 Evidence Synthesis sebagai Penghubung Antara Riset dan Kebijakan

Keputusan kebijakan sering kali tidak dapat didasarkan pada satu penelitian. Pemerintah perlu melihat kumpulan evidence, termasuk data statistik, hasil kajian sebelumnya, evaluasi kebijakan, pengalaman daerah lain, dan informasi administratif. Karena itu, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah Evidence Synthesis. Tahapan ini menggabungkan dan membandingkan berbagai sumber informasi sehingga pengambil keputusan memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Evidence synthesis dapat menghasilkan pemetaan masalah, analisis alternatif, perbandingan biaya dan manfaat secara proporsional, identifikasi risiko, serta tingkat keyakinan evidence yang tersedia. Pendekatan tersebut juga mencegah pengulangan penelitian. Apabila bukti yang cukup telah tersedia, Pemerintah Daerah dapat langsung melakukan sintesis atau kajian kebijakan cepat tanpa harus selalu membiayai penelitian baru. Dengan demikian, Research-to-Policy tidak identik dengan peningkatan jumlah penelitian, tetapi dengan peningkatan kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah tersedia.

3.6 Policy Translation dan Pengembangan Decision-Ready Knowledge

Salah satu kesenjangan antara dunia penelitian dan kebijakan adalah perbedaan format komunikasi. Laporan penelitian umumnya disusun untuk menunjukkan metodologi, data, analisis, dan argumentasi secara lengkap, sedangkan pengambil kebijakan memerlukan informasi yang lebih ringkas mengenai masalah, pilihan, manfaat, risiko, konsekuensi fiskal, dan tindakan yang mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi decision-ready knowledge.

Ranperda telah memberikan mandat bahwa BRIDA dapat memfasilitasi penerjemahan hasil menjadi rekomendasi kebijakan, prototipe, model layanan, pedoman, atau bentuk lain yang dapat digunakan. Produk utama Research-to-Policy dapat berupa Policy Brief, Executive Evidence Summary, Decision Note, rekomendasi teknis, opsi kebijakan, rancangan SOP, atau model implementasi. Policy Brief tidak sekadar menjadi ringkasan laporan. Dokumen tersebut harus menyajikan hubungan yang jelas antara masalah, evidence, alternatif kebijakan, manfaat, risiko, dan rekomendasi. Struktur konseptualnya dapat dirumuskan sebagai:

Policy Problem → Evidence → Policy Options → Implication → Recommendation.

Dengan mekanisme tersebut, kompleksitas hasil ilmiah diterjemahkan tanpa menghilangkan keterlacakan sumber dan keterbatasan evidence.

3.7 Policy Deliberation dan Evidence Dialogue

Penggunaan evidence memerlukan ruang interaksi antara peneliti, pengguna hasil, dan pengambil keputusan. Karena itu, model mengusulkan mekanisme Evidence Dialogue atau Policy Deliberation Forum. Forum tersebut bukan seminar diseminasi biasa. Tujuannya adalah membahas konsekuensi

evidence terhadap pilihan kebijakan, menguji kelayakan implementasi, mengidentifikasi kendala regulasi dan fiskal, serta memperoleh perspektif dari unit yang akan melaksanakan kebijakan.

BRIDA bertindak sebagai fasilitator, sedangkan Perangkat Daerah pengguna menjadi pihak utama dalam pembahasan. Apabila diperlukan, Bappeda, perangkat pengelola keuangan, Bagian Hukum, perguruan tinggi, tenaga ahli, atau masyarakat dapat dilibatkan sesuai karakter persoalan. Hasil forum tidak harus berupa penerimaan seluruh rekomendasi, melainkan record of policy consideration yang menunjukkan evidence apa yang dipertimbangkan dan keputusan apa yang diambil. Pendekatan ini penting untuk memperkuat akuntabilitas pengambilan keputusan tanpa mengurangi diskresi dan kewenangan pejabat yang berwenang.

3.8 Mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi

Model Research-to-Policy memerlukan sistem yang mampu memastikan bahwa rekomendasi tidak kehilangan jejak setelah disampaikan kepada pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan Research Recommendation Tracking Matrix. Matriks tersebut mencatat hubungan antara kajian, rekomendasi, unit pengguna, tanggapan, rencana tindakan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan perkembangan implementasi. Status rekomendasi dapat diklasifikasikan sebagai:

Diterima → Diterima dengan Penyesuaian → Dalam Persiapan → Dalam Implementasi → Telah Diterapkan → Direplikasi, atau apabila belum dapat digunakan, Ditunda → Belum Layak → Tidak Diterapkan dengan Alasan.

Hal yang penting bukan memaksakan implementasi seluruh rekomendasi, tetapi memastikan adanya traceability. Ranperda secara eksplisit mengatur bahwa Perangkat Daerah memberikan tanggapan atas rekomendasi dan BRIDA memantau tindak lanjut serta pemanfaatan hasil. Dengan demikian dapat dibangun hubungan:

Research → Recommendation → Response → Action → Result.

3.9 Dari Policy Adoption Menuju Policy Implementation

Pemanfaatan riset tidak berhenti pada keputusan menerima rekomendasi. Tahap berikutnya adalah memastikan rekomendasi yang telah dipilih dapat diterjemahkan menjadi intervensi yang dapat dilaksanakan. Bentuk implementasi dapat berupa perubahan regulasi, program, kegiatan, SOP, desain pelayanan, investasi, penerapan teknologi, pilot project, atau perubahan proses bisnis.

Sebelum diterapkan, hasil perlu diuji dari aspek kesiapan organisasi, kemampuan anggaran, regulasi, risiko, ketersediaan SDM, data, teknologi, dan dampak terhadap masyarakat. Untuk rekomendasi yang belum cukup siap, dapat digunakan pilot implementation. Pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan atau inovasi diuji dalam skala terbatas sebelum diperluas. Ranperda mengarahkan pemanfaatan hasil berdasarkan kesiapan, manfaat, risiko, keselamatan, kemampuan pembiayaan, kekayaan intelektual, dan ketentuan hukum. Dengan demikian, Research-to-Policy tidak hanya menjembatani riset dengan keputusan, tetapi juga menghubungkan keputusan dengan kemampuan implementasi.

3.10 Pengukuran Research Utilization

Salah satu inovasi penting dalam model ini adalah perubahan sistem pengukuran kinerja. Indikator penelitian pemerintah tidak cukup hanya menggunakan jumlah kegiatan, laporan, atau anggaran yang

terserap. Diperlukan indikator Research Utilization Rate, yaitu ukuran mengenai seberapa banyak hasil dan rekomendasi penelitian yang benar-benar masuk dalam proses kebijakan.

Pengukuran dapat dilakukan pada beberapa tingkat. Tingkat pertama adalah awareness, ketika pengguna mengetahui hasil riset. Tingkat kedua adalah consideration, ketika hasil dibahas sebagai salah satu dasar keputusan. Tingkat ketiga adalah adoption, ketika rekomendasi diterima dalam kebijakan atau program. Tingkat keempat adalah implementation, ketika kebijakan dilaksanakan. Tingkat kelima adalah impact, ketika perubahan yang dihasilkan dapat diukur.

Dengan kerangka tersebut, pemanfaatan tidak dilihat secara biner antara "digunakan" dan "tidak digunakan", tetapi sebagai suatu continuum: Awareness → Consideration → Adoption → Implementation → Impact. Model ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai hubungan penelitian dengan kebijakan.

3.11 Pengukuran Outcome dan Impact

Research-to-Policy perlu menghasilkan informasi mengenai manfaat, bukan hanya status tindak lanjut. Oleh karena itu, proses evaluasi membedakan antara output, utilization, outcome, dan impact.

Output adalah produk langsung berupa laporan, data, rekomendasi, atau policy brief. Utilization menunjukkan penggunaan hasil dalam proses kebijakan. Outcome menunjukkan perubahan yang terjadi setelah rekomendasi diterapkan, seperti perbaikan proses pelayanan, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku organisasi, atau peningkatan ketepatan sasaran. Impact merupakan perubahan pembangunan yang lebih luas dan biasanya membutuhkan waktu lebih panjang untuk diukur.

Ranperda telah mengarahkan penilaian berdasarkan relevansi, mutu, kebaruan, manfaat, dampak, efisiensi, keberlanjutan, kesiapan penerapan, potensi replikasi, dan kontribusi terhadap prioritas pembangunan. Dengan demikian, evaluasi riset tidak semata-mata menjadi evaluasi administrasi kegiatan, tetapi berkembang menjadi evaluation of knowledge use and public value.

3.12 Integrasi dengan Knowledge Management

Model Research-to-Policy membutuhkan basis pengetahuan yang memungkinkan seluruh perjalanan evidence ditelusuri. Sistem informasi riset dan inovasi karena itu harus mampu menyimpan tidak hanya dokumen penelitian, tetapi juga informasi mengenai masalah, pengguna, rekomendasi, tanggapan, status implementasi, dan hasil evaluasi.

Ranperda mengatur bahwa Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah sekurang-kurangnya memuat kegiatan dan hasil riset, rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut, data inovasi, status penerapan dan replikasi, mitra, serta data monitoring dan evaluasi.

Dalam kerangka Research-to-Policy, sistem tersebut dapat dikembangkan menjadi Evidence and Policy Knowledge Base. Struktur hubungan datanya bukan hanya berdasarkan arsip dokumen, tetapi:

Problem ID → Research ID → Evidence → Recommendation ID → Policy/User → Follow-up → Outcome → Impact

Dengan struktur tersebut, pemerintah dapat mengetahui sejarah evidence yang mendasari suatu kebijakan dan menggunakannya kembali ketika melakukan evaluasi atau penyempurnaan.

3.13 Model Kelembagaan Research-to-Policy

Model ini membutuhkan pembagian peran yang jelas. BRIDA menjadi evidence broker dan knowledge broker, sedangkan Bappeda memastikan keterkaitan dengan perencanaan pembangunan. Perangkat Daerah menjadi pemilik persoalan, penyedia konteks sektoral, pengguna evidence, sekaligus penanggung jawab implementasi sesuai kewenangannya.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berfungsi sebagai produsen evidence dan mitra dalam penjaminan mutu. Bagian Hukum dapat terlibat ketika rekomendasi membutuhkan regulasi. Perangkat pengelola keuangan berperan ketika opsi kebijakan mempunyai konsekuensi fiskal. Diskominfo mendukung tata kelola data dan knowledge management, sementara Inspektorat tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Hubungan kelembagaan tersebut tidak memerlukan pembentukan struktur permanen baru. Ranperda telah memungkinkan koordinasi dilakukan melalui forum riset dan inovasi, rapat koordinasi, kelompok kerja, atau mekanisme lain sesuai kebutuhan. Dengan demikian, inovasi kelembagaan diarahkan pada penguatan fungsi dan proses, bukan penambahan organisasi.

3.14 Nilai Kebaruan Model

Nilai kebaruan utama terletak pada perubahan orientasi pemanfaatan riset. Dalam pendekatan konvensional, rantai kegiatan sering berakhir pada penyelesaian laporan. Model yang diusulkan memperpanjang rantai tersebut sampai pada pengukuran hasil penggunaan evidence. Transformasinya dapat digambarkan sebagai:

Kajian → Laporan → Selesai

menjadi:

Policy Problem → Evidence → Research → Policy Translation → Policy Dialogue → Decision → Implementation → Impact → Learning.

Kebaruan berikutnya terletak pada kemampuan melakukan end-to-end traceability. Pemerintah dapat menelusuri permasalahan yang mendasari suatu penelitian, evidence yang dihasilkan, rekomendasi yang diberikan, tanggapan pengguna, keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan, hingga manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, keberhasilan kelitbangan tidak lagi semata diukur melalui research production, tetapi melalui research utilization and impact.

3.15 Tahapan Implementasi

Penerapan model perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diarahkan pada standardisasi mekanisme Research-to-Policy, termasuk format Evidence Need Statement, Policy Brief, Research Recommendation Tracking Matrix, dan indikator pemanfaatan.

Tahap kedua dilaksanakan melalui pilot pada beberapa kajian strategis yang mempunyai pengguna dan kebutuhan keputusan yang jelas. Seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan evidence hingga evaluasi pemanfaatan diuji pada pilot tersebut.

Tahap ketiga adalah integrasi proses Research-to-Policy ke dalam sistem informasi riset-inovasi sehingga seluruh perjalanan evidence dapat ditelusuri secara digital. Pada tahap berikutnya model diperluas ke seluruh kajian prioritas Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Tahap akhir diarahkan pada pembentukan evidence-informed policy culture, yaitu ketika penggunaan evidence bukan lagi

prosedur tambahan, tetapi menjadi kebiasaan organisasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

III. Rekomendasi

4.1 Pelembagaan Research-to-Policy sebagai Proses Baku

Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu menempatkan Research-to-Policy sebagai bagian dari tata kelola riset dan inovasi, bukan sebagai kegiatan tambahan setelah penelitian selesai. Pelembagaan perlu dimulai sejak penyusunan agenda prioritas dengan memastikan setiap penelitian yang ditujukan mendukung kebijakan telah memiliki policy problem, evidence need, research user, dan utilization plan. Dengan demikian, proses Research-to-Policy merupakan bagian integral mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

4.2 Penyusunan Pedoman Operasional Research-to-Policy

BRIDA perlu menyusun pedoman yang menjabarkan mekanisme Research-to-Policy secara operasional. Pedoman tersebut sekurang-kurangnya mengatur identifikasi kebutuhan bukti, pelibatan pengguna, evidence appraisal, evidence synthesis, penyusunan policy brief, policy dialogue, tindak lanjut, serta monitoring pemanfaatan. Pedoman perlu bersifat sederhana dan proporsional agar tidak menambah birokrasi penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan konsistensi kualitas proses.

4.3 Standardisasi Produk Policy Translation

Hasil kajian yang ditujukan untuk mendukung kebijakan perlu dilengkapi dengan produk yang sesuai dengan karakter pengguna. Karena itu direkomendasikan penyusunan standar Policy Brief, Executive Evidence Summary, dan Decision Note.

Dokumen tersebut tidak menggantikan laporan lengkap, tetapi menjadi jembatan antara hasil ilmiah dan kebutuhan pengambil keputusan. Standardisasi akan membantu membangun budaya komunikasi evidence yang lebih efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

4.4 Penerapan Research Recommendation Tracking Matrix

BRIDA perlu mengembangkan satu matriks terintegrasi yang mencatat seluruh rekomendasi hasil kajian dan status pemanfaatannya. Matriks harus menghubungkan rekomendasi dengan pengguna, tanggapan, penanggung jawab, tindakan, target waktu, dan hasil pelaksanaan. Sistem ini menjadi instrumen utama untuk melaksanakan ketentuan Ranperda mengenai tanggapan pengguna dan pemantauan pemanfaatan hasil. Data dari matriks selanjutnya menjadi dasar pelaporan kinerja riset yang lebih substantif.

4.5 Pengembangan Evidence Dialogue

Diseminasi hasil riset perlu dikembangkan dari seminar satu arah menuju Evidence Dialogue yang berorientasi pada keputusan. Forum digunakan untuk membahas evidence, menguji alternatif kebijakan, menilai risiko implementasi, dan memperoleh tanggapan

langsung dari pengguna. Evidence Dialogue dapat diselenggarakan secara selektif pada isu strategis, terutama yang mempunyai implikasi lintas Perangkat Daerah, anggaran besar, risiko tinggi, atau dampak publik yang luas. Hasil forum perlu didokumentasikan sebagai bagian dari jejak pertimbangan kebijakan.

4.6 Pengembangan Indeks Pemanfaatan Hasil Riset

BRIDA perlu secara bertahap mengembangkan ukuran kinerja pemanfaatan hasil. Salah satu instrumen yang direkomendasikan adalah Research Utilization Index Kabupaten Klungkung. Indeks tidak perlu langsung kompleks. Pada tahap awal dapat mengukur proporsi kajian yang memiliki pengguna, memperoleh tanggapan, digunakan dalam proses keputusan, diterapkan, dan dievaluasi. Melalui indikator tersebut, kinerja kelitbangan dapat bergeser dari: berapa banyak kajian diselesaikan menjadi: seberapa besar kajian tersebut digunakan dan memberikan manfaat.

4.7 Integrasi Research-to-Policy dengan Sistem Informasi Riset dan Inovasi

Pengembangan sistem informasi perlu mampu memfasilitasi seluruh perjalanan evidence, mulai dari kebutuhan riset sampai hasil implementasi. Sistem tidak cukup berfungsi sebagai repositori laporan. Arsitektur data perlu memungkinkan keterhubungan:

Permasalahan → Kajian → Evidence → Rekomendasi → Pengguna → Tindakan → Outcome

Pendekatan tersebut sejalan dengan Ranperda yang menempatkan sistem informasi sebagai sumber data bersama untuk pemanfaatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengembangan harus tetap mengikuti prinsip integrasi SPBE, interoperabilitas, dan Satu Data serta tidak otomatis berarti membangun aplikasi terpisah.

4.8 Penguatan Kapasitas BRIDA sebagai Knowledge Broker

mplementasi Research-to-Policy memerlukan penguatan kompetensi yang berbeda dari kemampuan penelitian konvensional. BRIDA perlu mempunyai kapasitas dalam problem framing, evidence appraisal, evidence synthesis, policy analysis, policy brief writing, knowledge translation, fasilitasi policy dialogue, serta monitoring utilization. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui jejaring perguruan tinggi, lembaga riset, BRIN, organisasi profesi, dan praktisi kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, BRIDA semakin berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan dan keputusan, bukan hanya pengelola administrasi kegiatan penelitian.

4.9 Pelaksanaan Pilot Research-to-Policy

odel sebaiknya terlebih dahulu diuji pada beberapa kajian strategis. Pemilihan pilot perlu mempertimbangkan adanya kebutuhan keputusan yang jelas, OPD pengguna yang teridentifikasi, evidence yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan kebijakan, serta outcome yang dapat dipantau. Pilot harus menjalankan siklus secara lengkap:

Policy Problem → Evidence Need → Research → Policy Brief → Evidence Dialogue → Decision

→ Implementation → Evaluation.

Hasil pilot kemudian digunakan untuk menyempurnakan pedoman, indikator, format dokumen, dan sistem informasi sebelum model diperluas.

4.10 Penguatan Evaluasi Pascapenerapan

Pemanfaatan hasil tidak boleh berhenti setelah rekomendasi diadopsi. Perlu dilakukan evaluasi pascapenerapan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang diperkirakan. Evaluasi juga penting karena keputusan yang berbasis evidence tetap mempunyai ketidakpastian. Efektivitas intervensi dapat berubah ketika diterapkan pada skala atau kelompok yang lebih luas. Karena itu, sistem Research-to-Policy harus membentuk feedback loop:

Evidence → Policy → Implementation → New Evidence → Policy Improvement.

4.11 Arah Pengembangan Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, penerapan model Research-to-Policy perlu diarahkan pada terbentuknya Klungkung Evidence-Informed Policy Ecosystem. Ekosistem tersebut tidak hanya bergantung pada BRIDA, tetapi melibatkan Perangkat Daerah sebagai pengguna aktif evidence, Bappeda sebagai integrator pembangunan, perguruan tinggi sebagai mitra pengetahuan, serta masyarakat sebagai sumber pengalaman dan umpan balik.

Semarapura, 03 November 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-